

Judul : Kaji ulang dana BOS untuk makan siang gratis
Tanggal : Minggu, 03 Maret 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Kaji Ulang Dana BOS untuk Makan Siang Gratis

Penggunaan dana BOS untuk makan siang gratis akan mengganggu dana operasional sektor pendidikan.

M. IQBAL AL MACHMUDI
m.iqbal@mediaindonesia.com

WACANA pembiayaan program makan siang gratis dari bantuan operasional sekolah (BOS) dinilai akan menjadi beban dan masalah baru, terutama pembiayaan bagi guru. Diberitakan sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembiayaan program makan siang gratis dari paslon nomor urut 2 bakal dibiayai dari dana BOS.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai wacana pembiayaan program makan siang gratis yang diambil dari dana BOS perlu ditinjau ulang karena jika itu diterapkan, akan mengganggu operasional sektor pendidikan.

"Menurut saya, program makan siang gratis ini harus ditinjau ulang, apalagi kalau menggunakan dana BOS. Ini berarti mengurangi dana pendidikan yang sudah kecil," kata Esther saat dihubungi, kemarin.

Diwacanakan pembiayaan makan siang gratis dari dana BOS tersebut menandakan pemerintah kebingungan sektor mana saja yang bisa dialokasikan untuk program makan siang yang membutuhkan dana sekitar Rp450 triliun

per tahun.

"Kalau dana BOS ini dipakai untuk makan siang gratis, akan mengurangi porsi belanja pendidikan dan menurunkan kualitas pendidikan yang masih rendah ditunjukkan dari skor PISA Indonesia yang rendah tentunya juga ini akan mengganggu belanja pendidikan secara keseluruhan," ujar dia.

Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menolak keras wacana tersebut. "Demi program ambisius, jangan korbankan pendidikan kita, sangat disayangkan keputusan pemerintah yang diam-diam mengurangi alokasi dana BOS sebanyak Rp539 miliar pada 2023 dengan alasan defisit APBN. Terlebih lagi, sebesar 50% BOS juga digunakan untuk membayar gaji guru dan tenik honorer," kata Fikri, kemarin.

Perlu diketahui, dana BOS merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

"Sebab itu, dana BOS hadir agar generasi muda dapat mengenyam pendidikan dasar tanpa kendala biaya pendidikan yang memberatkan, jadi, jangan bebankan BOS un-

Rencana Pembiayaan Program Makan Siang Gratis

- Dana akan menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS).
- Pola pendanaan akan melibatkan BOS spesifik atau BOS afirmasi yang khusus untuk penyediaan makan siang bagi siswa.
- Penggunaan dana BOS sebesar Rp15.000 per anak.
- Dana akan langsung disalurkan ke rekening sekolah.



Potensi Baik-Buruk Program Makan Siang Gratis

Potensi Baik

- Dapat mengurangi kebiasaan siswa dalam mengonsumsi jajan di pinggir jalan yang tidak terjaga kebersihannya.
- Mengatasi kesenjangan sosial.
- Mendorong peningkatan ekonomi bagi industri makanan, peternakan, dan pertanian.

Potensi Buruk

- Berpotensi mengganggu anggaran sektor pendidikan lain.
- Hanya menguntungkan beberapa pihak.
- Menjadi alat politik mendapatkan dukungan masyarakat untuk pemilu selanjutnya.
- Peluang meningkatkan korupsi dan inflasi.



Sumber: Metro Bidang Perekonomian/Esther M

tuk program yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Silakan, pakai anggaran lain," serunya.

Dirinya mendesak pemerintah, terutama Kemendikbud-Kistek dan Kemenag, untuk memperjuangkan agar alokasi dana BOS tidak diutak-atik. Baginya, kebijakan program 'makan siang gratis' ini

masih belum jelas anggaran ataupun nomenklaturinya. "Apalagi, ini program nonpemerintah dari paslon yang belum resmi dilantik dan menjabat, semua ada aturannya dalam undang-undang. Kami harus perjuangkan dana BOS murni hanya untuk pendidikan," tandas Fikri.

Menambah persoalan

Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri dengan tegas menolak wacana tersebut karena BOS mencakup banyak hal dalam sektor pendidikan, termasuk membayar gaji guru.

"Pertama, sebagian besar dana BOS dipakai untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer. Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya sebab ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS," kata Iman, kemarin.

Jika mengharapkan pemenuhan gizi pada anak sekolah, guru dan tenaga honorer juga perlu pemenuhan gizi, terutama pada keluarga mereka.

"Bicara gizi, kami harap gurunya juga mendapatkan asupan gizi. Itu perlu dipertimbangkan juga," ujarnya.

Dengan anggaran APBN yang sekarang saja, belum mampu menyejahterakan guru, memperbaiki fasilitas sekolah, dan memajukan kualitas pendidikan. Tentu hal ini dapat memperburuk keadaan jika anggaran pendidikan, termasuk dana BOS dari APBN, digunakan untuk program makan siang gratis.

Untuk sekolah jenjang SD, data BPS menunjukkan 60,60% ruang kelas dalam kondisi rusak pada tahun ajaran 2021/2022. "Apalagi kalau harus menanggung beban makan siang gratis. Kita perlu mendiskusikan ini secara serius ketika presiden terpilih nanti sudah ditetapkan KPU," jelasnya.

Selain itu, jumlah anggaran dana BOS dari pemerintah pusat itu selalu turun tiap tahun. Pada 2022 ke 2023, dana BOS berkurang hingga Rp539 miliar. Jika dana BOS digunakan untuk program tersebut, dikhawatirkan akan mengorbankan pembiayaan sektor lain yang lebih esensial dalam belanja sekolah, seperti upah guru honorer. (H 2)